

## Internalisasi Filosofi Pancawaluya Bagi Penguatan *Civic Disposition* Siswa Melalui Pendidikan Pancasila di Kelas dan Sekolah

Erma Yunita<sup>a,1</sup>, Munawir Hadi<sup>a,2\*</sup>, Iqbal Arpannudin<sup>a,3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup> ermayunita.2025@student.uny.ac.id\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

*Received: 11 Agustus 2026;*  
*Revised: 1 September 2026;*  
*Accepted: 4 Oktober 2026.*

Kata kata kunci:  
Pancawaluya;  
Civic disposition;  
Pendidikan Pancasila;  
Kearifan lokal;  
Internalisasi nilai.

### : ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merumuskan mekanisme psikologis internalisasi filosofi *Pancawaluya* untuk menguatkan *civic disposition* peserta didik melalui Pendidikan Pancasila. Tinjauan literatur integratif terhadap 36 sumber dianalisis melalui pengodean tematik, perbandingan konsep, validasi koherensi konseptual, dan triangulasi antardokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa *cageur*, *bageur*, *bener*, *pinter*, dan *singer* membentuk kontinum privat-publik yang dimediasi regulasi diri, sensitivitas moral, penalaran sosio-moral, motivasi moral, kompetensi sosial-emosional, serta efikasi diri kewarganegaraan. Internalisasi afektif berlangsung ketika keteladanan dan klarifikasi nilai diikuti analisis dilema, praktik kolaboratif, aksi kewarganegaraan, umpan balik, dan refleksi autentik. Refleksi menghubungkan pengalaman dengan identitas moral sehingga nilai dipandang sebagai bagian dari diri dan dasar tindakan. Kebaruan kajian terletak pada pemetaan mekanisme psikologis lima nilai *Pancawaluya* dan siklus internalisasi yang mengintegrasikan model empat komponen moral, pembelajaran sosial, SEL, serta *civic self-efficacy*. Kerangka ini menawarkan dasar konseptual bagi desain pembelajaran dan pengembangan instrumen psikometrik lima dimensi *Pancawaluya*.

### ABSTRACT

Keywords:  
*Pancawaluya;*  
*Civic disposition;*  
*Pancasila Education;*  
*Local wisdom;*  
*Value internalization.*

***Internalizing the Pancawaluya Philosophy to Strengthen Students' Civic Disposition through Pancasila Education in the Classroom and School.*** This study aims to formulate a psychological mechanism for the internalization of the *Pancawaluya* philosophy to strengthen students' civic disposition through Pancasila Education. An integrative literature review of 36 sources was conducted using thematic coding, conceptual comparison, conceptual coherence validation, and cross-document triangulation. The findings indicate that *cageur*, *bageur*, *bener*, *pinter*, and *singer* form a private-public continuum mediated by self-regulation, moral sensitivity, socio-moral reasoning, moral motivation, social-emotional competence, and civic self-efficacy. Affective internalization occurs when modeling and value clarification are followed by dilemma analysis, collaborative practice, civic action, feedback, and authentic reflection. Reflection connects experience with moral identity, enabling values to be perceived as integral to the self and as a basis for action. The novelty of this study lies in mapping the psychological mechanisms underlying the five *Pancawaluya* values and developing an internalization cycle that integrates the four-component model of morality, social learning, social-emotional learning (SEL), and civic self-efficacy. This framework provides a conceptual foundation for instructional design and the development of a five-dimensional psychometric instrument for *Pancawaluya*.

Copyright © 2026 (Erma Yunita, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Yunita, E., Hadi, M., & Arpannudin, I. (2026). Internalisasi Filosofi Pancawaluya Bagi Penguatan Civic Disposition Siswa Melalui Pendidikan Pancasila di Kelas dan Sekolah. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 63–73.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v6i1.4714>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pendidikan Pancasila memiliki mandat yang lebih luas daripada pemindahan pengetahuan konstitusional (Gumilar, 2024). Mata pelajaran ini diarahkan untuk membentuk warga negara yang mampu memahami nilai, menilai persoalan publik secara bertanggung jawab, serta menunjukkan perilaku yang selaras dengan Pancasila (Huda et al., 2026). Pada Fase D, Capaian Pembelajaran tidak berhenti pada pemahaman sejarah dan kedudukan Pancasila, tetapi menuntut penerapan nilai Pancasila, norma, hak dan kewajiban, penerimaan terhadap keberagaman, pelestarian kearifan lokal, serta partisipasi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan tersebut mengisyaratkan bahwa keberhasilan pembelajaran perlu terlihat pada cara peserta didik mengambil keputusan dan bertindak, bukan hanya pada penguasaan konsep. Karena itu, pembentukan *civic disposition* atau watak kewarganegaraan menjadi tujuan yang melekat pada proses pembelajaran Pendidikan Pancasila (Parwati dkk, 2023).

*Civic disposition* merujuk pada kecenderungan nilai, sikap, identitas, dan kebiasaan yang membuat pengetahuan serta keterampilan kewarganegaraan digunakan secara bertanggung jawab. Branson (1998) membedakan karakter privat dan publik untuk kepentingan analitis, tetapi keduanya bukan kategori yang terpisah secara psikologis. Disiplin diri, tanggung jawab moral, dan integritas pada ranah personal menopang kemampuan bermusyawarah, menghormati perbedaan, serta berpartisipasi di ruang publik. Dalam model empat komponen moral, tindakan etis memerlukan sensitivitas terhadap persoalan moral, penilaian atas tindakan yang tepat, motivasi untuk memprioritaskan nilai moral, dan kapasitas mengimplementasikan keputusan (Rest, 1986; King & Sparks, 2022). Dengan demikian, *civic disposition* lebih tepat dipahami sebagai sistem psikologis yang menghubungkan orientasi afektif, penalaran, identitas, efikasi diri, dan tindakan kewarganegaraan, bukan sekadar daftar sikap kurikuler (Mulyono, 2017; Parwati et al., 2023).

Kesenjangan antara mengetahui nilai dan melakukannya muncul karena pengetahuan moral tidak otomatis menghasilkan perilaku. Peserta didik dapat menjelaskan kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab, tetapi gagal mengenali dimensi moral suatu situasi, tidak menempatkan nilai sebagai prioritas, merasa tidak mampu bertindak, atau tidak memiliki keterampilan menghadapi tekanan kelompok. Blasi (1984) menjelaskan bahwa pertimbangan moral menjadi lebih konsisten ketika nilai terintegrasi ke dalam identitas diri; temuan tentang sentralitas identitas moral juga menunjukkan kaitannya dengan kecenderungan bertindak moral (Aquino & Reed, 2002; Krettenauer, 2022). Dari perspektif pembelajaran sosial, perilaku dipelajari melalui perhatian terhadap model, pengamatan konsekuensi, praktik, umpan balik, dan keyakinan akan kemampuan diri (Bandura, 1986). Bukti mutakhir menegaskan bahwa paparan terhadap model prososial meningkatkan perilaku prososial pengamat (Greitemeyer, 2022), sedangkan efikasi diri kewarganegaraan berkaitan dengan keterlibatan sipil peserta didik (Damiani et al., 2024). Karena itu, pembelajaran yang berhenti pada ceramah nilai berisiko gagal mengubah perilaku apabila tidak menyediakan keteladanan, latihan pengambilan keputusan, pengalaman keberhasilan, dan refleksi identitas.

Kearifan lokal dapat menjadi jembatan antara nilai Pancasila yang bersifat nasional dan pengalaman sosial peserta didik yang konkret. Nilai lokal menghadirkan bahasa, tradisi, keteladanan, serta persoalan yang dikenali peserta didik sehingga konsep kewarganegaraan lebih kontekstual. Sumardjoko dan Musyiam (2018) menunjukkan bahwa model Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal yang memadukan pembelajaran kooperatif, *problem-based learning*, dan *value clarification* dapat meningkatkan karakter serta identitas kebangsaan. Komalasari dan Saripudin (2018) menemukan bahwa sumber belajar berbasis nilai hidup berpengaruh positif terhadap pembentukan karakter peserta didik. Faiz dan Soleh (2021) juga menegaskan bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal menjadi bermakna ketika nilai budaya dihubungkan dengan praktik pendidikan.

Rangkaian temuan tersebut menempatkan kearifan lokal bukan sebagai ornamen budaya, melainkan sebagai sumber pengalaman untuk menafsirkan dan mengaktualisasikan nilai Pancasila.

Dalam konteks budaya Sunda, filosofi *Pancawaluya* memuat lima orientasi karakter, yaitu *cageur*, *bageur*, *bener*, *pinter*, dan *singer*. Secara umum, *cageur* berkaitan dengan kesehatan dan keseimbangan diri; *bageur* dengan kebaikan, empati, dan relasi sosial; *bener* dengan integritas dan tindakan sesuai norma; *pinter* dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan bekerja bersama; sedangkan *singer* dengan kecekatan, kreativitas, keberanian bertindak, dan daya juang. Portal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoperasionalkan kelima nilai tersebut ke dalam ranah kesejatan, keterkaitan, berpikir, kolaborasi, dan tindakan (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2025). Jika dipetakan secara kewarganegaraan, kelima nilai mencakup pengelolaan diri, kualitas relasi, orientasi moral, kapasitas penalaran, dan kesiapan bertindak. Kerangka ini menunjukkan bahwa *Pancawaluya* memuat kapasitas individual sekaligus sosial yang relevan dengan *civic disposition*.

Kajian terdahulu telah menempatkan *Pancawaluya* dalam beragam ranah pendidikan. Aprily et al. (2021) menunjukkan perannya dalam pengasuhan dan pendidikan karakter anak usia dini, sedangkan Utami (2021) menerjemahkan kelima nilai ke dalam pembelajaran sejarah. Asteka et al. (2023) menemukan integrasi *Pancawaluya* pada materi, interaksi, dan praktik pembelajaran sociolinguistik, sementara Sofyan et al. (2026) menempatkannya sebagai model pendidikan karakter pada tingkat satuan pendidikan. Febrianty dan Handayani (2026) memperkuat landasan epistemologis pengelolaan pendidikan karakter berbasis nilai lokal, dan Firdaus et al. (2026) menghubungkan Panca Waluya dengan *civic virtue* pada pendidikan tinggi. Namun, kajian-kajian tersebut belum menjelaskan secara memadai mekanisme afektif dan sosial-kognitif yang mengubah nilai lokal menjadi tindakan kewarganegaraan, hubungan mediasi antara disposisi internal dan performa publik, serta kriteria validitas konseptual dalam memasangkan setiap nilai dengan konstruk psikologis.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan merumuskan kerangka internalisasi filosofi *Pancawaluya* untuk menguatkan *civic disposition* peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila. Kajian diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana koherensi nilai *cageur*, *bageur*, *bener*, *pinter*, dan *singer* dengan mekanisme psikologis *civic disposition*? Kedua, bagaimana proses internalisasi afektif menghubungkan penalaran sosio-moral, identitas moral, kompetensi sosial-emosional, efikasi diri kewarganegaraan, dan tindakan? Ketiga, bagaimana implikasinya terhadap desain pembelajaran dan asesmen Pendidikan Pancasila? Kebaruan artikel terletak pada pemetaan mekanisme psikologis kelima nilai, perumusan kontinum karakter privat-publik, serta siklus internalisasi yang dapat diuji secara empiris dan dikembangkan menjadi instrumen psikometrik.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur integratif (Snyder, 2019) terhadap 36 sumber, terdiri atas 30 artikel jurnal bereviu sejawat, empat karya teoretis fondasional, dan dua dokumen kebijakan atau kurikulum resmi. Sumber ditelusuri melalui Google Scholar, Garuda, Crossref, laman penerbit, dan situs resmi pemerintah menggunakan kata kunci *Pancawaluya*, *Panca Waluya*, *cageur bageur bener pinter singer*, *civic disposition*, *moral identity*, *affective internalization*, *socio-moral reasoning*, *civic self-efficacy*, *social-emotional learning*, Pendidikan Pancasila, dan kearifan lokal, dengan kriteria inklusi berupa relevansi terhadap nilai, mekanisme pembentukan disposisi, pembelajaran karakter atau kewarganegaraan, serta prosedur sintesis dan asesmen. Data dianalisis menggunakan enam fase analisis tematik reflektif (Byrne, 2022), pengodean deduktif dan induktif, uji validitas konseptual, triangulasi antardokumen, pencatatan kasus negatif, dan jejak audit matriks sumber-kode-tema.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil sintesis menunjukkan bahwa *Pancawaluya* memiliki koherensi konseptual dengan *civic disposition* karena kelima nilainya mencakup pengelolaan diri, kualitas relasi sosial, orientasi moral, kapasitas penalaran, dan kesiapan bertindak. Koherensi tersebut tidak bersifat satu nilai-satu konstruk dan tidak membentuk dikotomi privat-publik yang kaku. *Cageur* dan *bener* terutama menyediakan fondasi internal berupa regulasi diri dan integritas; *bageur* dan *pinter* menjembatani fondasi tersebut melalui sensitivitas terhadap orang lain, penalaran sosio-moral, serta kolaborasi; sedangkan *singer* menampilkan hasilnya dalam bentuk inisiatif dan aksi kewarganegaraan. Aksi publik kemudian menghasilkan pengalaman dan umpan balik yang, melalui refleksi, kembali menguatkan identitas moral serta pengaturan diri.

Hubungan tersebut sejalan dengan model empat komponen moral yang menempatkan sensitivitas, penilaian, motivasi, dan implementasi sebagai proses saling bergantung (Rest, 1986; King & Sparks, 2022). Kajian pada pendidikan menengah juga menunjukkan bahwa penalaran moral saja tidak memadai tanpa perhatian pada sensitivitas, motivasi, dan kapasitas bertindak (Van der Leij et al., 2022). Karena itu, karakter privat berfungsi sebagai prasyarat yang memengaruhi tindakan publik melalui mekanisme mediasi, bukan sebagai kategori akhir. Tabel 1 memetakan orientasi dominan setiap nilai tanpa meniadakan tumpang tindih antarnilai.

**Tabel 1.** Pemetaan nilai Pancawaluya dan *civic disposition*

| Nilai  | Orientasi <i>civic disposition</i>                                                                                 | Indikator dan pengalaman belajar                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cageur | Disiplin diri, pengendalian emosi, ketangguhan, penghargaan terhadap diri dan orang lain                           | Menjaga kebugaran dan ketertiban belajar; mengelola emosi saat berbeda pendapat; jurnal refleksi; kesepakatan kelas yang sehat dan aman. |
| Bageur | Empati, kesantunan, toleransi, kepedulian sosial, penghormatan terhadap martabat manusia.                          | Dialog lintas perbedaan; kerja kelompok inklusif; layanan sosial; kemampuan mendengar, menghargai, dan membantu tanpa diskriminasi.      |
| Bener  | Integritas, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepatuhan kritis terhadap norma dan hukum                         | Analisis, dilema moral; musyawarah aturan kelas; pemeriksaan fakta; konsistensi antara alasan, keputusan, dan tindakan.                  |
| Pinter | Keterbukaan berpikir, penalaran kritis, kebijaksanaan, kemampuan mengambil keputusan dan berkolaborasi.            | Inkuiri isu publik; analisis bukti; debat terarah; pemecahan masalah dan perumusan alternatif kebijakan bersama.                         |
| Singer | Inisiatif, partisipasi, kreativitas, responsivitas, keberanian bertindak dan daya juang untuk kepentingan bersama. | Proyek kewarganegaraan; kampanye publik; advokasi sederhana; evaluasi dampak aksi; perbaikan berkelanjutan.                              |

Pemetaan pada Tabel 1 merupakan proposisi konseptual, bukan bukti bahwa kelima istilah lokal identik dengan konstruk psikologis baku. Hubungan *cageur* dengan regulasi diri, misalnya, ditetapkan karena keduanya sama-sama berfungsi mengelola keadaan internal dan respons perilaku, tetapi *cageur* tetap memiliki keluasan makna jasmani, spiritual, dan komunal yang tidak seluruhnya tercakup dalam regulasi diri. Pembatasan serupa diterapkan pada nilai lain agar sintesis tidak mereduksi makna budaya sekaligus tetap menghasilkan hipotesis yang dapat diuji.

*Cageur* berfungsi sebagai fondasi regulasi diri karena keseimbangan fisik, emosi, dan spiritual membantu peserta didik menunda reaksi, mengelola kemarahan, menerima koreksi, dan bertahan dalam dialog yang menantang (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2025). Dalam kerangka SEL, kemampuan tersebut beririsan dengan kesadaran diri dan pengelolaan diri. Internalisasi afektif terjadi ketika peserta didik bukan hanya mengetahui pentingnya pengendalian diri, tetapi mengalami, memantau, dan mengevaluasi respons emosinya pada situasi nyata. Karena itu, kontrak dialog, latihan jeda reflektif, dan jurnal pengelolaan konflik relevan sebagai pengalaman konkret.

*Bageur* menghubungkan regulasi internal dengan sensitivitas moral dan perilaku prososial. Peserta didik perlu mengenali kebutuhan, perasaan, hak, dan kemungkinan dampak keputusan terhadap orang lain sebelum mampu memberikan respons yang beradab. Pembelajaran kooperatif tidak otomatis menumbuhkan *bageur* apabila hanya membagi tugas; diperlukan keteladanan prososial, norma mendengar, kesempatan bicara yang setara, pengambilan perspektif, dan umpan balik atas kualitas relasi. Mekanisme ini sesuai dengan pembelajaran sosial, karena perilaku guru dan teman sebaya menjadi model yang diamati serta ditiru (Bandura, 1986; Greitemeyer, 2022).

*Bener* merupakan titik temu antara pertimbangan moral, motivasi, dan identitas. Peserta didik mungkin mengetahui aturan, tetapi tetap memilih diam atau mengikuti tekanan kelompok apabila kejujuran dan keadilan belum dianggap penting bagi dirinya. Analisis dilema—misalnya konflik antara loyalitas pertemanan dan kewajiban melaporkan kecurangan—membantu peserta didik menguji fakta, nilai, konsekuensi, dan konsistensi alasan. Refleksi selanjutnya menghubungkan keputusan dengan pertanyaan identitas: “orang seperti apa yang ingin saya menjadi?” Dengan cara itu, nilai bergerak dari kepatuhan eksternal menuju komitmen internal yang lebih stabil (Blasi, 1984; Krettenauer, 2022).

*Pinter* menekankan penalaran sosio-moral dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itikad baik perlu didukung kemampuan memeriksa bukti, mengenali bias, memahami perspektif yang bertentangan, memperkirakan konsekuensi, dan merevisi pendapat. Pada tahap ini, penilaian moral Rest bekerja bersama kompetensi SEL berupa pengambilan keputusan bertanggung jawab dan keterampilan relasi. Inkuiri isu publik, dialog berbasis bukti, serta *value clarification* membantu peserta didik menghindari kepatuhan buta maupun relativisme moral karena keputusan tetap diuji terhadap Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, dan kepentingan bersama (Sumardjoko & Musyiam, 2018).

*Singer* merepresentasikan implementasi moral: kemampuan mengubah pengetahuan, emosi, dan niat menjadi tindakan yang efektif. Transformasi ini dimediasi *civic self-efficacy*, yaitu keyakinan bahwa diri mampu memahami masalah publik, bekerja bersama orang lain, menyampaikan gagasan, dan menghasilkan perubahan. Temuan Damiani et al. (2024) menunjukkan bahwa peserta didik yang lebih terlibat memiliki efikasi kewarganegaraan lebih tinggi dan bahwa kesempatan memecahkan masalah perlu disertai refleksi metakognitif. Oleh sebab itu, proyek kewarganegaraan perlu dirancang sebagai pengalaman keberhasilan bertahap, bukan sekadar penugasan produk. Peserta didik mengidentifikasi masalah, merancang solusi, melaksanakan aksi, mengevaluasi dampak, dan memperbaiki strategi; proses inilah yang menguatkan *singer* sekaligus keyakinan untuk bertindak kembali.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa internalisasi berlangsung sebagai siklus kognitif-afektif-sosial, bukan melalui satu metode tunggal. Model empat komponen moral menjelaskan urutan fungsional dari mengenali persoalan hingga bertindak, sedangkan teori pembelajaran sosial menerangkan bagaimana keteladanan, penguatan, praktik, dan efikasi diri membentuk perilaku. SEL menyediakan kompetensi penghubung berupa kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan keputusan bertanggung jawab. Budaya sekolah serta keluarga kemudian menjaga konsistensi pengalaman lintas konteks (Hidayah et al., 2026; Zalmi & Montessori, 2022).

Berdasarkan sintesis tersebut, artikel ini merumuskan lima tahap internalisasi: orientasi nilai, analisis dilema, praktik kolaboratif, aksi kewarganegaraan, dan refleksi autentik.

**Tabel 2.** Siklus internalisasi Pancasila dalam pembelajaran

| Tahap                | Mekanisme dan strategi pembelajaran                                                                                             | Bukti perkembangan <i>civic disposition</i>                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orientasi nilai      | Pemodelan dan sensitivitas moral: cerita lokal, pengalaman peserta didik, keteladanan, serta penamaan emosi dan nilai.          | Peserta didik mampu menjelaskan nilai dengan bahasa sendiri dan mengenali relevansinya pada masalah nyata. |
| Analisis dilema      | Penalaran sosio-moral: analisis kasus, konflik nilai, bukti, aturan, hak, kewajiban, pihak terdampak, dan konsekuensi.          | Alasan moral lebih konsisten, terbuka terhadap koreksi, dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain.       |
| Praktik kolaboratif  | SEL dan latihan terbimbing: musyawarah, simulasi, kerja inklusif, pembagian peran, umpan balik, dan pembiasaan norma dialog.    | Disiplin, empati, kemampuan mendengar, tanggung jawab peran, serta penyelesaian konflik yang beradab.      |
| Aksi kewarganegaraan | Efikasi dan implementasi moral: proyek masalah nyata, kampanye, layanan sosial, advokasi sederhana, atau rekomendasi kebijakan. | Inisiatif, partisipasi, kreativitas, ketekunan, dan dampak tindakan yang dapat didokumentasikan.           |
| Refleksi autentik    | Identitas moral: jurnal, narasi pengalaman, konferensi reflektif, penilaian diri/teman, portofolio, dan umpan balik guru.       | Peserta didik menghubungkan nilai, keputusan, tindakan, dampak, dan rencana perbaikan perilaku.            |

Tahap orientasi nilai mencegah *Pancawaluya* dipahami sebagai daftar kosakata. Guru memulai dari pengalaman konkret, ungkapan budaya, cerita tokoh lokal, persoalan yang dihadapi peserta didik, dan keteladanan perilaku. Pada materi norma, misalnya, guru dapat mengajukan pertanyaan mengapa aturan diperlukan, siapa yang terdampak ketika aturan dilanggar, dan bagaimana *bener* dibedakan dari kepatuhan buta. Pada materi Bhinneka Tunggal Ika, *bageur* dibahas melalui pengalaman menerima perbedaan dan menghindari stereotip. Pemodelan prososial memberi gambaran perilaku yang dapat ditiru, sedangkan penamaan emosi dan pihak terdampak membangun sensitivitas moral (Greitemeyer, 2022).

Tahap analisis dilema mengembangkan penalaran sosio-moral. Guru menyajikan masalah yang mengandung ketegangan kepentingan, kemudian peserta didik mengidentifikasi fakta, pihak terdampak, aturan, nilai *Pancawaluya*, pilihan, dan konsekuensi. Pertanyaan diarahkan pada empat proses: apakah peserta didik mengenali persoalan moral, dapat memberi alasan yang adil, memiliki motivasi memprioritaskan nilai, dan mampu merancang tindakan. Penggunaan dilema serta kerja kelompok terbukti relevan untuk mengembangkan komponen moral pada pendidikan menengah, asalkan diskusi tidak berhenti pada jawaban abstrak (Van der Leij et al., 2022).

Tahap praktik kolaboratif mengubah nilai menjadi kebiasaan interaksi melalui kompetensi SEL. Kesadaran diri membantu peserta didik mengenali emosi; pengelolaan diri menahan respons impulsif; kesadaran sosial dan keterampilan relasi mendukung empati, pengambilan perspektif, serta penyelesaian konflik; keputusan bertanggung jawab menjaga tindakan tetap berbasis bukti dan nilai. Kajian mutakhir menunjukkan kompetensi sosial-emosional berkaitan positif dengan keterlibatan peserta didik (Santos et al., 2023), dan program SEL meningkatkan keterampilan, sikap, serta perilaku

sosial positif ketika disesuaikan dengan konteks budaya (Chen & Yu, 2022). Karena itu, aturan dialog, rotasi peran, umpan balik antarteman, dan keteladanan guru merupakan bagian inti internalisasi, bukan sekadar pengelolaan kelas.

Tahap aksi kewarganegaraan memberikan pengalaman keberhasilan yang membangun *civic self-efficacy*. Proyek dimulai dari masalah yang berada dalam jangkauan peserta didik, seperti sampah, perundungan, penggunaan gawai, akses fasilitas, keselamatan lalu lintas, atau pelestarian budaya. Tugas dipecah menjadi sasaran bertahap agar peserta didik mengalami keberhasilan nyata: mengumpulkan data, mewawancarai pemangku kepentingan, menyusun alternatif, bermusyawarah, bertindak, dan mendokumentasikan dampak. Pengalaman penguasaan, pengamatan keberhasilan teman, persuasi sosial, serta pengelolaan emosi selama menghadapi hambatan memperkuat keyakinan bahwa tindakan bersama dapat menghasilkan perubahan (Bandura, 1986; Damiani et al., 2024).

Tahap refleksi autentik mengubah pengalaman menjadi pembelajaran identitas. Peserta didik menelusuri apa yang dipikirkan, dirasakan, dipilih, dilakukan, dan dihasilkan; membandingkan tindakan aktual dengan nilai ideal; lalu merumuskan perbaikan. Refleksi tidak cukup berupa kesan umum, tetapi perlu pertanyaan yang menguji keterkaitan antara alasan, emosi, dampak, tanggung jawab, dan konsep diri. Identitas moral berkembang ketika tujuan menjadi orang bermoral bergerak dari motivasi eksternal menuju komitmen internal serta dihubungkan dengan tindakan berulang (Krettenauer, 2022). Narasi autobiografis membantu peserta didik mengintegrasikan pengalaman moral ke dalam pemahaman tentang dirinya dan menopang komitmen jangka panjang terhadap tindakan moral (Vanello, 2025).

Peran SEL dalam siklus ini bersifat transformatif. *Cageur* memperoleh dukungan dari kesadaran dan pengelolaan diri; *bageur* dari kesadaran sosial dan keterampilan relasi; *pinter* dari keputusan bertanggung jawab; sedangkan *bener* dan *singer* mengintegrasikan seluruh kompetensi tersebut ke dalam komitmen serta tindakan. SEL tidak boleh direduksi menjadi teknik menenangkan emosi tanpa dimensi keadilan. Praktik yang menghubungkan identitas peserta didik, isu sosial, suara siswa, dan aksi kolektif justru dapat mendorong keterlibatan kewarganegaraan yang lebih bermakna (McGovern et al., 2023).

Dalam model ini, *civic self-efficacy* berperan sebagai mediator proksimal antara kapasitas internal dan tindakan publik. Regulasi diri, empati, integritas, serta penalaran menyediakan sumber daya, tetapi tindakan baru muncul ketika peserta didik juga percaya bahwa dirinya mampu berkontribusi dan memperoleh kesempatan bertindak. Karena itu, guru perlu memberikan tingkat tantangan yang meningkat, peran yang autentik, umpan balik pada strategi, dan kesempatan mengulang aksi. Keberhasilan kecil yang direfleksikan memperkuat efikasi; efikasi yang meningkat mendorong partisipasi lebih lanjut; partisipasi berikutnya menyediakan pengalaman baru bagi pembentukan identitas moral.

Asesmen autentik perlu menangkap perubahan pada lintasan tersebut. Observasi guru, jurnal refleksi, penilaian diri, penilaian teman, portofolio, dan konferensi singkat digunakan secara triangulatif untuk melihat konsistensi perilaku di berbagai situasi. Rubrik memuat indikator yang dapat diamati—misalnya kemampuan mengelola perbedaan, mengambil perspektif, menggunakan bukti secara jujur, mempertahankan tanggung jawab, mengambil inisiatif, dan mengevaluasi dampak serta tidak menyimpulkan watak dari satu kejadian. Data refleksi juga digunakan sebagai umpan balik perkembangan, bukan sekadar pemberian label baik atau buruk.

Kerangka internalisasi ini dapat diintegrasikan ke setiap elemen Pendidikan Pancasila. Pada elemen Pancasila, peserta didik menafsirkan hubungan kelima nilai dengan sila dan tindakan sehari-hari. Pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *bener* dan *pinter* digunakan untuk menilai aturan, hak, kewajiban, serta kebebasan berpendapat. Pada elemen Bhinneka Tunggal

Ika, *bageur* menjadi dasar penghormatan terhadap perbedaan, sedangkan *singer* diwujudkan melalui aksi pelestarian budaya dan penyelesaian masalah sosial. Pada elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelima nilai dapat digunakan untuk merancang partisipasi yang menjaga persatuan tanpa menghapus identitas lokal. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai lensa etnopedagogis, bukan materi tambahan yang berdiri di luar capaian pembelajaran.

Implementasi kerangka ini memerlukan dukungan ekosistem sekolah. Pertama, sekolah perlu menyepakati definisi operasional agar nilai tidak ditafsirkan secara berubah-ubah. Literatur dan dokumen resmi menunjukkan variasi penekanan pada makna *pinter* dan *singer*. Variasi tersebut dapat diterima selama sekolah merumuskan indikator yang konsisten, tetap berpijak pada makna budaya, dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Kedua, guru memerlukan contoh modul ajar, kasus, rubrik, dan proyek yang dapat diadaptasi. Pendampingan implementasi Pancasila menunjukkan bahwa guru dapat memandang kebijakan karakter sebagai tambahan administrasi ketika integrasinya dalam pembelajaran belum jelas (Rahman et al., 2026). Oleh karena itu, penguatan kapasitas sebaiknya berfokus pada desain pengalaman belajar, bukan penambahan format pelaporan.

Ketiga, internalisasi harus terhubung dengan budaya sekolah dan keluarga. Nilai sulit menjadi kebiasaan apabila peserta didik menerima pesan yang berbeda antara kelas, tata tertib, organisasi siswa, dan lingkungan keluarga. *Cageur* perlu didukung oleh lingkungan aman; *bageur* oleh relasi yang bebas perundungan; *bener* oleh tata kelola yang adil; *pinter* oleh budaya bertanya dan membaca; serta *singer* oleh kesempatan mengambil inisiatif. Sofyan et al. (2026) menekankan perlunya strategi pada tingkat satuan pendidikan, kelas, serta kemitraan keluarga dan masyarakat. Sinergi tersebut tidak berarti menyeragamkan seluruh perilaku, tetapi memastikan nilai utama dialami secara konsisten dalam berbagai ruang.

Keempat, penggunaan Pancasila perlu menghindari eksklusivisme budaya. Kearifan lokal berfungsi memperkuat Pancasila ketika nilai diinterpretasikan secara terbuka dan dapat berdialog dengan keragaman Indonesia. *Bageur* tidak boleh hanya berlaku bagi kelompok yang dianggap sama; *bener* tidak boleh digunakan untuk membenarkan dominasi budaya; dan pelestarian identitas lokal tidak boleh mengurangi hak peserta didik dari latar yang berbeda. Kerangka ini karena itu menempatkan Pancasila sebagai sumber etis yang kontekstual sekaligus terbuka terhadap prinsip kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan kebinekaan.

Secara teoretis, sintesis ini memperjelas bahwa *civic disposition* terbentuk melalui kontinum internal-publik. Pancasila menyediakan orientasi normatif, *Pancawaluya* menyediakan bahasa budaya, model empat komponen moral menjelaskan prasyarat tindakan, pembelajaran sosial menjelaskan proses pemodelan dan efikasi, SEL menyediakan kompetensi intrapersonal-interpersonal, sedangkan identitas moral memberi stabilitas motivasional. Hubungan kelima unsur tersebut menjelaskan mengapa hafalan nilai sering gagal mengubah perilaku dan mengapa pengalaman nyata harus diikuti refleksi. Walaupun demikian, kerangka ini tetap berupa model konseptual; arah mediasi, kekuatan hubungan antardimensi, variasi jenjang, dan pengaruh konteks sekolah memerlukan pengujian kuantitatif, kualitatif, serta eksperimental.

## Simpulan

Internalisasi filosofi *Pancawaluya* menguatkan *civic disposition* siswa melalui pengintegrasian *cageur*, *bageur*, *bener*, *pinter*, dan *singer* dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila serta budaya sekolah. *Cageur* dan *bener* membentuk regulasi diri dan integritas, *bageur* dan *pinter* mengembangkan sensitivitas moral, kompetensi sosial-emosional, serta penalaran sosio-moral, sedangkan *singer* mendorong partisipasi dan aksi kewarganegaraan. Proses internalisasi dilaksanakan melalui orientasi nilai, analisis dilema, praktik kolaboratif, aksi kewarganegaraan, dan refleksi autentik. Di kelas, proses tersebut diwujudkan melalui keteladanan, dialog, kerja kelompok, proyek, dan asesmen autentik, serta

diperkuat secara konsisten oleh budaya sekolah. Dengan demikian, *Pancawaluya* membentuk siswa yang mampu mengelola diri, bertindak benar, menghargai orang lain, bernalar dalam menghadapi persoalan publik, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab.

## Referensi

- Aprily, N. M., Rizqi, A. M., & Purwati, P. (2021). Cageur bageur bener pinter singer: Filosofi pengasuhan Sunda dalam pendidikan karakter di Raudhatul Athfal (RA). *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 16(1), 11–24. <https://doi.org/10.21009/JIV.1601.2>
- Aquino, K., & Reed, A. II. (2002). The self-importance of moral identity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83(6), 1423–1440. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.6.1423>
- Asteka, P., Wiyanti, S., & Rahmawati, S. (2023). Integration of Pancawaluya as West Java's local wisdom in sociolinguistics learning. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 9(2), 828–842. <https://doi.org/10.22219/kembara.v9i2.42397>
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice Hall.
- Blasi, A. (1984). Moral identity: Its role in moral functioning. In W. M. Kurtines & J. L. Gewirtz (Eds.), *Morality, moral behavior, and moral development* (pp. 128–139). Wiley.
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education*. Center for Civic Education.
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56, 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Chen, H., & Yu, Y. (2022). The impact of social-emotional learning: A meta-analysis in China. *Frontiers in Psychology*, 13, 1040522. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1040522>
- Damiani, V., Caponera, E., Losito, B., Palmerio, L., & Agrusti, G. (2024). Young people's civic engagement in Italy: Evidence on grade 8 students from the International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016. *Large-scale Assessments in Education*, 12, 36. <https://doi.org/10.1186/s40536-024-00229-4>
- Faiz, A., & Soleh, B. (2021). Implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 7(1), 68–77. <https://doi.org/10.22219/jinop.v7i1.14250>
- Febrianty, F., & Handayani, Y. (2026). Epistemological foundations of character education management based on local values: The case of Pancawaluya. *Pedagonal: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(1). <https://doi.org/10.55215/pedagonal.v10i1.56>
- Firdaus, A., Iswandi, F., Shahat, S. A. A., & Ramadhan, J. (2026). Panca Waluya-based character education in civic education: A conceptual model for strengthening students' civic virtue in higher education. *Cognitive Development Journal*, 4(1), 41–53. <https://doi.org/10.32585/cognitive.v4i1.70>
- Greitemeyer, T. (2022). Prosocial modeling: Person role models and the media. *Current Opinion in Psychology*, 44, 135–139. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.08.024>
- Gumilar, A. T. (2024). Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Melalui Pendidikan Konstitusi di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(1), 24–31. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2287>
- Hidayah, Y. N. P., Suastika, I. N., & Sanjaya, D. B. (2026). Internalization of character education values through civic education learning in the digital era: Strategies and multidimensional collaboration. *Journal of Educational Sciences*, 10(1), 1473–1484. <https://doi.org/10.31258/jes.10.1.p.1473-1484>
- Huda, K., Febrianti, D., & Nabilah, R. S. (2026). Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila. *Edu Society Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1364–1368. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2406>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (n.d.). *CP & ATP Pendidikan Pancasila Fase D*. <https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/sd-sma/pendidikan-pancasila/fase-d/>
- Khasanah, A. N., & Adi, F. P. (2026). Implementasi kearifan lokal dalam P5 sebagai upaya pembentukan karakter kewarganegaraan. *Didaktika Dwija Indria*, 14(1). <https://doi.org/10.20961/ddi.v14i1.104816>
- King, P. M., & Sparks, T. (2022). An examination of students' moral character experiences using the Four Component Model and Self-Evolution Theory. *Journal of College and Character*, 23(2), 97–118. <https://doi.org/10.1080/2194587X.2022.2053292>

- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2018). The influence of living values education-based civic education textbook on students' character formation. *International Journal of Instruction*, 11(1), 395–410. <https://doi.org/10.12973/iji.2018.11127a>
- Krettenauer, T. (2022). Development of moral identity: From the age of responsibility to adult maturity. *Developmental Review*, 65, 101036. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2022.101036>
- McGovern, G., Pinetta, B. J., Montoro, J. M., Channey, J., Rosario-Ramos, E., & Rivas-Drake, D. (2023). Stretching towards social justice: A case study of transformative social and emotional learning (SEL). *Social and Emotional Learning: Research, Practice, and Policy*, 2, 100018. <https://doi.org/10.1016/j.sel.2023.100018>
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 218–225. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.17007>
- Parwati, Y., Saylendra, N. P., & Nugraha, Y. (2023). Efektivitas pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan civic disposition siswa pada Kurikulum Merdeka. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(9), 310–316. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i9.1782>
- Parwati, Y., Saylendra, N. P., & Nugraha, Y. (2023). Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Civic Disposition Siswa Pada Kurikulum Merdeka. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(9), 310–316. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i9.1782>
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2025). *Pancawaluya: Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan budaya Jawa Barat*. <https://sipalawa.jabarprov.go.id/>
- Rahman, M. A., Febrianti, F. A., Jamilah, J., & Lestari, R. S. (2026). Pendampingan implementasi pendidikan karakter Pancawaluya (cageur, bageur, bener, pinter, singer) di sekolah. *Publikasi Pendidikan*, 16(2). <https://doi.org/10.70713/publikan.v16i2.83725>
- Rahmelia, S., Apandie, C., & Nurizka, R. (2026). Penguatan civic disposition melalui praktik pedagogik partisipatif: Analisis literatur dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 14(2), 186–196. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v14n2.p186-196>
- Rest, J. R. (1986). *Moral development: Advances in research and theory*. Praeger.
- Santos, A. C., Simões, C., Melo, M. H. S., Santos, M. F., Freitas, I., Branquinho, C., Cefai, C., & Arriaga, P. (2023). A systematic review of the association between social and emotional competencies and student engagement in youth. *Educational Research Review*, 39, 100535. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2023.100535>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sofyan, F. S., Sundawa, D., & Wutsqah, U. (2026). Pancawaluya character education: Integrating Sundanese cultural values to strengthen a superior generation in West Java. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(1), 65–75. <https://doi.org/10.24269/jpk.v11i1.12851>
- Sumardjoko, B., & Musyiam, M. (2018). Model of civic education learning based on the local wisdom for revitalizing values of Pancasila. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 37(2), 201–211. <https://doi.org/10.21831/cp.v37i2.18037>
- Syahwaliana, K., Habib, T. A., Shofiyah, S. N. A., & Oki, S. (2025). Integrasi nilai Pancasila dalam pembentukan civic disposition melalui Pendidikan Pancasila: Systematic literature review. *Jurnal Kewarganegaraan*, 22(1), 76–88. <https://doi.org/10.24114/jk.v22i1.64360>
- Utami, K. S. N. (2021). Representasi filosofi cageur, bageur, bener, pinter, tur singer terhadap upaya penguatan karakter peserta didik dalam pembelajaran sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 4(2), 115–122. <https://doi.org/10.17509/historia.v4i2.25952>
- Van der Leij, T., Avraamidou, L., Wals, A., & Goedhart, M. (2022). Supporting secondary students' morality development in science education. *Studies in Science Education*, 58(2), 141–181. <https://doi.org/10.1080/03057267.2021.1944716>
- Vanello, D. (2025). Moral identity, moral integration, and autobiographical narrative. *Review of Philosophy and Psychology*, 16, 29–46. <https://doi.org/10.1007/s13164-023-00722-9>
- Zakariya, Y. F. (2022). Cronbach's alpha in mathematics education research: Its appropriateness, overuse, and alternatives in estimating scale reliability. *Frontiers in Psychology*, 13, 1074430. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1074430>

Zalmi, P. O., & Montessori, M. (2022). Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan budaya sekolah dalam mengembangkan nilai civic disposition siswa di SMPN Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 10(1), 9–22.  
<https://doi.org/10.21831/jppfa.v10i1.45549>